PEMETAAN KESELARASAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PADA RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Roberta Zulphi Surya

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Indragiri

Email: robertazulphi@yahoo.co.id

Received : 16 Maret 2018 ; Accepted : 4 Maret 2018

Abstract

This SDGs Data Mapping exercise helps us to estimate readiness of Indragiri Hilir in applying proposed SDGs indicators to measure SDGs targets; for which indicator data improvement is required and where the data gaps exist. SDGs consist of 17 goals, 169 targets and 241 Indicators. In order to be able to measure the achievements of the SDGs targets, set of indicators are required and data needs to be available to apply those indicators. The exercise was conducted through desk review method by mapping for each SDGs Target existing relevant indicators used or proposed in the local documents: Indragiri Hilir Medium- Term Development Plan 2013-2018 (RPJMD) and others relevant documents as required. The indicators mapping then followed by data mapping for each indicator based on the availability and quality of data from Statistics Agency (BPS) and line Agencies. The indicators mapping showed 16 goals, 46 targets dan 67 Indicators relevant.

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

1. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 Millenium Development Goals (MDGs) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan) [1].

Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pioneer dan role model Kabupaten lain pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan yang di dukung oleh United Nation Development Programme (UNDP). Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target SDGs, diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan indikator tersebut untuk dapat dipergunakan. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kesesuaian antara

dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka hasil (result framework) yang terdiri dari sasaran dan indikator TPB/SDGs [4].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 Millenium Development Goals (MDGs) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan) [1].

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, SDGs jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan "Tanpa Kelaparan", akan dituntaskan Tujuan tersebut hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai "Zero Goal" [3]. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030

adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zero). TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator [1;3].

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs.

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi

pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-

prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pemetaan terhadap kesesuaian antara TPB/SDGs dan Indikator pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan metode desk review, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data primer yang tertulis dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan ditopang dengan data-data sekunder berupa peraturan perundang – undangan tentang perencanaan daerah, Peraturan Daerah (Perda) , laporan data statistik Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau, laporan pemetaan di masing – masing instansi terkait, dokumen perencanaan, instansi di Kabupaten Indragiri Hilir, buku – buku dan jurnal yang relevan.

Dalam penelitian awal ini dokumen primer yang digunakan sebagai obyek studi adalah RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2013 – 2018 dan dokumen Rencana aksi nasional TPB/SDGs. Untuk memperkuat hasil pemetaan, maka dilakukan rapat pembahasan indikator dengan stakeholder

Langkah pemetaan indikator adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SK Tim Koordinasi SDGs yang terdiri dalam 4 pilar (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Hukum dan tata kelola) yang terdiri dari unsur pemerintah, pendidikan tinggi, perusahaan, filantropi, dan media
2. Konsultan menyiapkan draft pemetaan indikator sesuai dengan dokumen-dokumen terkait pembangunan
3. Pertemuan membahas indikator-indikator sesuai peran masing-masing dalam upaya mewujudkan TPB/SDGs. Khusus untuk target pemerintah dilakukan pengkajian keselarasan antara indikator target TPB/SDGs dengan indikator pembangunan yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Sementara untuk unsur non-pemerintah indikator target TPB/SDGs dilakukan pengkajian

keselarasan dengan program kerja yang lembaga non pemerintah

4. Finalisasi indikator yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

4. HASIL

Berdasarkan hasil pemetaan indikator, pada tabel 1 berikut di sampaikan indikator TPS/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1. Uraian Indikator TPS/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan			
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
1.3	Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
		1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
		1.3.1 (d)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat
1.4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan,	1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir		
	memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.		proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.		kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan serta bencana		per 100.000 orang		
		1.4.1 (d)	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			TUJUAN 2 Menghilangkan Kelaparan			
		1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			2.2	Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
		1.4.1 (f)	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh			2.3	Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1 (a)	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam
		1.4.1 (g)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat						
		1.4.1 (h)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat						
						1.4.1 (i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	2.4	Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan
		1.4.1 (j)	Rasio bayi berakte kelahiran						
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana						

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
	produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta meningkatkan tanah dan kualitas tanah.						Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar
				3.2	Pada 2030, Mengakhiri Kematian Bayi Dan Balita Yang Dapat Dicegah, Dengan Seluruh Negara Berusaha Menurunkan Angka Kematian Neonatal Setidaknya Hingga 12 Per 1.000 Kh Dan Angka Kematian Balita 25 Per 1.000	3.2. 2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
						3.2. 2 (a)	Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
2.5.	Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.	2.5. 1 (a)	Terselenggara nya sistem pengembangan, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat Indragiri Hilir	3.3	Pada Tahun 2030, Mengakhiri Pandemi Aids, Tuberkulosis, Malaria, Dan Penyakit Tropis Yang Terabaikan Serta Memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber Air, Dan Penyakit Menular Lainnya	3.3. 1	Pelayanan terhadap Penyakit Menular, DBD, HIV/AIDS, Filariasis, TB Paru, dll
				3.A	Memperkuat Pelaksanaan FCTC WHO Di Seluruh Negara Secara Tepat	3.a. 1.	Persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun
				3.B	Mendukung Penelitian Dan Pengembangan Vaksin Dan Obat Penyakit Menular Maupun Tidak Menular Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Negara-Negara Berkembang, Menyediakan Akses Obat Dan Vaksin Dasar Yang Terjangkau, Sesuai Doha Declaration Tentang Trips Agreement And Public Health, Yang Menegaskan Hak Negara Berkembang Untuk Menggunakan Secara Penuh Ketentuan-Ketentuan Dalam	3.b. 1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
3.1	Pada Tahun 2030, Mengurangi Angka Kematian Ibu Hingga Kurang Dari 70 Per 100.000 Kelahiran Hidup	3.1. 1	Jumlah kematian ibu yang terdata (terlaporkan)				
		3.1. 2	Persentase Kunjungan Kehamilan (ANC) yang memenuhi standar minimal 4 kali (K4)				
		3.1. 2 (a)	Persentase Persalinan di Fasilitas				

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
	Kesepakatan Atas Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Pada Hak Properti Intelektual Terkait Keleluasaan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat, Dan Pada Khususnya, Menyediakan Akses Obat Bagi Semua Orang.				memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar		Dini (PAUD).
3.5	Memperkuat Pencegahan Dan Pengobatan Penyalahgunaan Zat, Termasuk Penyalahgunaan Narkotika Dan Penggunaan Berbahaya Alkohol	3.5.1 (f)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
3.6	Pada Tahun 2020, Mengurangi Separuh Kematian Global Dan Cedera Dari Kecelakaan Jalan Lalu Lintas	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	4.4	Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3.8	Mencapai Universal Health Coverage, Termasuk Perlindungan Risiko Keuangan, Akses Kepada Pelayanan Kesehatan Dasar Berkualitas Dan Akses Kepada Obat-Obatan Dan Vaksin Dasar Yang Aman, Efektif, Dan Berkualitas Bagi Semua Orang	3.8.2	(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1.a	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat
TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas							
4.1	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.			4.5.1.b	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/seederajat
		4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLPT/MTs/sederajat.			4.5.1.c	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/se
		4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/seederajat				
4.2	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia				

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
4.6	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung	4.6.1	Persentase masyarakat melek huruf	5.6	Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing platform for Action serta dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
4.c	Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS	4.c.1 (c)	Jumlah PTK dalam jabatan berkualifikasi akademik S-1/D-4 di pendidikan dasar	5.6.2		Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	
TUJUAN 5 Kesetaraan Gender							
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	TUJUAN 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak			
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	6.1.1 (b)		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	
		5.5.2	persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6.1.1 (c)		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau				TUJUAN 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur			
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1.	Rasio elektrifikasi		untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.		program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan
TUJUAN 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				TUJUAN 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur			
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1. (a)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1. (a)	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (%)
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2.*	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka/TP T			9.1.1. (b)	Panjang Jalan Kabupaten (Km)
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.	Kontribusi pariwisata terhadap PDB			9.1.2. (b)	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/ Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1.	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan	9.2.1. (a)	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
8.B	Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global	8.B.1.	Total pengeluaran pemerintah dalam				

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
	dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang		
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri
TUJUAN 11 Membangun Kota dan Permukiman Berkelanjutan			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan	11.1.1. (a)	Prosentase jumlah rumah layak huni. 8
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
		11.6.1. (b)	Ratio RTH Persatuan wilayah ber HPL/HGB (%)
TUJUAN 12 Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan			
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
	tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1. (a)	Jumlah muatan lokal pendidikan yang berwawasan lingkungan
TUJUAN 13 Penanganan perubahan iklim			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
TUJUAN 14 ekosistem lautan			
Indikator SDGs goals 14 tidak selaras dengan RPJMD karena meskipun geografis Indragiri Hilir berada di Pesisir pantai timur Sumatera namun bidang kelautan menjadi wewenang tingkat provinsi			
TUJUAN 15 ekosistem daratan			
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1 (a)	Persentase penyelesaian tindakan pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi
TUJUAN 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	16.1.1.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
		16.1.3.	Proporsi penduduk

No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir	No	Tujuan TPB/SDGs	No	Indikator SDGs Indragiri Hilir
			yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.				s Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1. (b).	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan .			16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan
16.3	Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan (Dibahas di Goal 5)	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) INHIL
		16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.			16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) INHIL
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	16.5.1.	RAD Anti Korupsi	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran (Dibahas di Goal 1)	16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.
				TUJUAN 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan			
16.6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, menurut sektor (atau kode anggaran atau sejenisnya)	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
		16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilita				

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 241 Indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan tabel 1 di atas target dan Indikator TPB/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan daerah yaitu sebanyak 16 tujuan, 46 target dan 67 Indikator.

Indikator yang tergolong sebagai Indikator sama (Similiar) antara lain terkait Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (Neonatal), Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs. Indikator yang tergolong sebagai Indikator Mendikati (Proxy) antara lain terkait Rasio Elektrifikasi dan Persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan indikator yang tidak sama dengan indikator global misalnya data terkait kepemilikan senjata api.

Indikator-indikator terkait kehutanan, pertambangan, energi, pendidikan jenjang SLTA serta Tujuan ke 14 terkait Ekosistem Lautan tidak termasuk dalam Indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir karena wewenang kelautan per tahun 2017 telah menjadi wewenang provinsi di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Tabel 2 Target dan Indikator TPB/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
5 Goals 22 Target 32 Indikator	5 Goals 10 Target 13 Indikator	5 Goals 8 Target 11 Indikator	1 Goals 6 Target 11 Indikator

5. KESIMPULAN DAN SARAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil pemetaan, tujuan, target dan Indikator TPB/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan daerah yaitu sebanyak 16 tujuan, 46 target dan 67 Indikator. Tujuan ke 14 terkait Ekosistem Lautan tidak termasuk dalam Indikator pembangunan Kabupaten.

Kajian ini merupakan studi awal untuk penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sehingga dapat dijadikan acuan

pada penyusunan Dokumen berikutnya serta dokumen lain yang terkait pembangunan daerah serta menjadi dasar acuan bagi penyusunan program kerja lembaga non pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

United Nation Development Programme (UNDP) serta Tanoto Foundation mendukung penuh pilot project Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah SDGs di Provinsi Riau dan 3 Kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Makalah ini adalah bagian dari laporan penyusunan RAD SDGs Kabupaten Indragiri Hilir. Pendanaan kegiatan tersebut berasal dari anggaran UNDP sesuai kontrak No. UNDP-IC/176/2017 tanggal 18 Mei 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2016
- [2] UNDP dan UNEP, Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets. Case of Indonesia [Report], 2015
- [3] Ishatono dan S.T. Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan. SHARE Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, 2016
- [4] Bappeda Inhil, Draf Final Rencana Aksi Daerah SDGs Kab. Inhil 2017 – 2018. [Dokumen Daerah], 2017